

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bukunya yang berjudul “Leviathan” pada tahun 1651, Thomas Hobbes menyebutkan bahwa manusia secara alamiah bersifat egois, didorong oleh rasa takut akan kematian dan keinginan untuk mendapatkan kekuatan lebih, sehingga menjadikan konflik sebagai bagian dari sifat alamiah manusia. Pendapat Hobbes ini terbukti benar apabila kita melihat kondisi dunia saat ini, dengan konflik dan perang besar yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti Perang Rusia-Ukraina di Eropa, Konflik Israel-Gaza di Timur Tengah, dan meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Jepang di Timur. Konflik yang terakhir dapat ditelusuri kembali ke sejarah permusuhan berabad-abad antara kedua negara, yang menciptakan sentimen negatif di antara warganya (He, 2014).

Konflik antara Tiongkok dan Jepang ini semakin diperparah dengan lokasi geografis Jepang di peta, yang dapat dilihat sebagai penghalang sekaligus batu loncatan bagi *Island Chain Strategy* milik Tiongkok, sebuah strategi untuk mendukung impian Tiongkok akan supremasi laut di sekitar wilayah Pasifik. Persaingan ini, disertai dengan meningkatnya pergerakan militer Tiongkok di sekitar wilayah tersebut, telah mengakibatkan perubahan dalam kebijakan pertahanan/keamanan Jepang sebagai bentuk keseimbangan menyeimbangi kekuatan Tiongkok.

Kebijakan pertahanan/keamanan sendiri adalah kerangka kerja yang digunakan negara untuk merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan

langkah-langkah untuk melindungi kedaulatan, mengamankan integritas teritorial, dan merespons potensi ancaman di sekitar wilayah mereka. Strategi ini seringkali melibatkan kombinasi dari modernisasi, pengembangan, dan pergerakan militer untuk beradaptasi dengan perubahan tantangan keamanan. Dalam hubungan internasional, kebijakan pertahanan secara langsung terkait dengan konsep kedaulatan suatu negara, yang menunjukkan hak mereka untuk memerintah dirinya sendiri tanpa campur tangan atau ancaman dari luar, di mana kebijakan pertahanan yang kuat menandakan kemampuan dan kemauan negara untuk mempertahankan perbatasan dan kepentingannya (Sarjito, 2023). Dalam hal ini, Samudra Pasifik dan perairan di sekitarnya sedang berada di pusat geopolitik global, menjadi tuan rumah bagi beberapa rute perdagangan maritim yang paling penting, serta titik-titik persimpangan laut yang strategis, termasuk Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan, yang dimana keduanya merupakan rute perdagangan yang sangat strategis dan padat dalam lalu lintas pelayaran dunia. Kontrol atas perairan ini tidak hanya diterjemahkan secara langsung ke dalam keuntungan ekonomi, tetapi juga keamanan maritim nasional (Tertia & Perwita, 2018).

Khususnya untuk hubungan Tiongkok-Jepang pada tahun 2012, ketegangan telah meningkat secara drastis setelah sengketa teritorial mereka atas pulau-pulau terpencil di Laut Cina Timur, yang menimbulkan emosi yang kuat dari rakyat Tiongkok dan Jepang. Wilayah ini merupakan rumah bagi Kepulauan Senkaku/Diaoyu, sebuah rantai pulau yang terletak secara strategis di antara perbatasan kedua negara, yang berperan sebagai pertahanan alami bagi Jepang, dan batu loncatan potensial menuju laut terbuka bagi Tiongkok. Para pemimpin

Tiongkok dan Jepang telah mengesampingkan sengketa teritorial ini selama tahap akhir negosiasi Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan tahun 1978, dan telah bekerja sama sejak saat itu untuk menjauhkan masalah ini dari agenda diplomatik mereka. Namun, pada bulan September 2010, sebuah kapal pukat ikan berkewarganegaraan Tiongkok menabrak dua kapal *Coast Guard* Jepang di dekat kepulauan tersebut dan ditangkap oleh Pemerintah Jepang, sehingga menghidupkan kembali isu tersebut. (Smith S. A., 2015). Pengangkatan kembali isu ini kemudian menjadi alasan bagi Tiongkok untuk mendorong agenda *Island Chain Strategy* mereka demi mencapai supremasi laut di kawasan ini.

Dalam bukunya yang berjudul “*The Influence of Sea Power upon History*” (Pengaruh Kekuatan Laut terhadap Sejarah) pada tahun 1890, Alfred Thayer Mahan berargumen tentang pentingnya supremasi laut, menjelaskan perannya terhadap dominasi global, dengan penekanan pada hasil yang bisa diperoleh dari kekuatan angkatan laut dalam memperluas kontrol atas rute perdagangan strategis, dan dalam memastikan keamanan nasional negara melalui laut. Mengikuti penekanan Mahan pada supremasi laut, untuk mempertahankan dan berpotensi meningkatkan cengkeraman mereka terhadap perdagangan global dan kekuatan regional, Tiongkok harus memastikan supremasi laut mereka di sekitar wilayah teritorialnya. Tantangannya kemudian datang dari lokasi geografisnya, sebuah daratan besar di Asia Timur dengan garis pantai yang sama panjangnya, namun jika diperhatikan lebih lanjut, garis pantai dan perbatasannya dikelilingi oleh pulau-pulau milik negara-negara yang berada di bawah pengaruh, atau secara politis lebih condong ke arah Amerika Serikat, yang kemudian dilihat sebagai hambatan yang menghalangi

kehadiran Angkatan Laut Tiongkok di kawasan Pasifik, dan berpotensi membahayakan rute perdagangan dan keamanan nasionalnya (Popescu, 2024).

Untuk menjamin pertumbuhan dan keamanan nasionalnya, memastikan dominasi laut mereka di kawasan Pasifik kemudian akan menjadi tujuan yang paling penting bagi angkatan laut Tiongkok. Di sinilah *Island Chain Strategy* yang disebutkan di atas memainkan peran penting dalam mencapai tujuan supremasi laut mereka. Strategi itu sendiri pada awalnya merupakan rencana blokade maritim yang disusun oleh John Foster Dulles dalam membatasi akses laut Uni Soviet dan Tiongkok di Pasifik Barat dengan mengelilinginya dengan pangkalan angkatan laut atau kekuatan sekutu di daerah tersebut (Umetsu, 1996). Rencana ini kemudian diadopsi oleh Angkatan Laut Tiongkok sendiri, dengan tujuan menggunakan rantai pulau yang diusulkan dalam rencana awal dalam strategi mereka sendiri untuk menggunakannya sebagai tolok ukur dalam “intervensi balasan”, dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mendorong supremasi laut mereka ke arah lautan lepas Samudra Pasifik dan sekitarnya. Masalahnya muncul ketika rantai pulau itu, yang dipisahkan menjadi tiga bagian, mencakup negara-negara seperti Jepang dan Taiwan, yang berada di urutan pertama dalam proyeksi Tiongkok akan supremasi laut mereka di rantai pulau tersebut. Fakta ini, bersama dengan modernisasi angkatan laut Tiongkok yang besar, pergerakan militer yang semakin agresif di sekitar wilayah tersebut (U.S. Department of State, 2023), dan sengketa teritorial yang ada di antara kedua negara, telah mengakibatkan meningkatnya kekhawatiran Jepang.

Kekhawatiran Jepang terhadap strategi ini terlihat jelas, dikarenakan implementasi dan realisasi strategi itu sendiri memiliki implikasi yang signifikan bagi Jepang, termasuk ancaman dalam isu-isu keamanan nasional, kedaulatan teritorial, dan sebagainya. Strategi ini, yang dirancang untuk memperluas pengaruh maritim Tiongkok dan melawan kehadiran eksternal, secara langsung menantang kepentingan strategis Jepang di wilayah Pasifik. Salah satu dampak yang paling langsung adalah tantangan terhadap kedaulatan teritorial Jepang, di mana seperti yang telah disebutkan berkali-kali sebelumnya, kedua negara terlibat dalam perselisihan atas kepulauan Senkaku/Diaoyu di bagian timur Tiongkok, yang berada di bawah administrasi *de facto* dan *de jure* Jepang, namun diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari wilayah historisnya (Zhai, 2021). Di bawah *Island Chain Strategy*, Tiongkok telah meningkatkan kehadirannya di dekat pulau-pulau tersebut, mengerahkan kapal-kapal Penjaga Pantainya, armada nelayan, dan pesawat terbang untuk menegaskan klaimnya dan melemahkan kendali Jepang atas wilayah tersebut, memaksa Jepang untuk meresponnya dengan patroli maritim dan pencegahan udara yang juga meningkat.

Pembangunan militer Tiongkok, termasuk pergerakan aset militer, semakin memperumit dilema keamanan Jepang. Selain itu, latihan dan pergerakan Angkatan Laut Tiongkok yang sering dilakukan di dekat perairan Jepang menunjukkan kemampuan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatan di luar garis pantainya, sehingga meningkatkan kekhawatiran Jepang tentang keamanan Zona Ekonomi Eksklusifnya serta adanya potensi eskalasi di daerah yang disengketakan. Militerisasi Tiongkok di daerah sekitar kepulauan dan rute perdagangan berikutnya

sangat bermasalah, dengan membangun pulau-pulau buatan yang dilengkapi dengan *runway* pesawat, sistem radar, dan persiapan *missile*, menyebabkan kehadiran mereka di daerah itu sendiri mengganggu rute perdagangan Jepang. Bagi Jepang, hal ini meningkatkan risiko gangguan rantai pasokan dan peningkatan biaya yang terkait dengan pengalihan jalur pelayaran, yang merupakan pukulan besar bagi ekonomi mereka yang bergantung pada perdagangan (Kotani, 2020).

Respons Jepang terhadap *Island Chain Strategy* Tiongkok ini mencerminkan pendekatan yang gigih dan beragam untuk menghadapi tantangan yang semakin meningkat yang ditimbulkan oleh negara tetangganya. Inti dari strategi ini adalah penguatan kemampuan militer Jepang secara signifikan, dan perubahan drastis dalam kebijakan pertahanan/keamanan yang lebih kuat dan tegas. Di bawah Konstitusi Jepang tahun 1947 Pasal 9, Jepang menolak perang sebagai hak berdaulat dan melarang pemeliharaan angkatan darat, laut, atau udara untuk berperang, yang secara efektif melarang pembentukan militer dalam negara Jepang. Namun, sebagai tanggapan terhadap ketegangan Perang Dingin dan tekanan dari Amerika Serikat untuk berkontribusi pada keamanannya sendiri, *Japan Self-Defence Force* (JSDF) didirikan pada tahun 1954 dengan peran utama untuk mempertahankan wilayah Jepang, tanpa kapasitas untuk melakukan operasi militer ofensif (Chan, 2022). Kebijakan pertahanan/keamanan pasif ini juga dibentuk oleh faktor-faktor domestik, terutama Doktrin Yoshida, yang diambil dari nama Perdana Menteri Shigeru Yoshida, yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sambil mengawasi ketat mengenai masalah pertahanan/keamanan, bersama dengan sentimen publik yang kuat yang menentang langkah apapun menuju remiliterisasi

Jepang (Hoshiro, 2022), hingga pergantian masa jabatan Perdana Menteri Shinzo Abe pasca tahun 2012.

Menghadapi tantangan keamanan regional termasuk ketegangan yang disebutkan di atas dengan Tiongkok, pemerintah Abe menafsirkan ulang Pasal 9 untuk memungkinkan pertahanan diri kolektif, yang memungkinkan Jepang untuk membela sekutunya yang sedang di bawah serangan atau tekanan, dan memperluas cakupan kegiatan JSDF untuk mencakup pemeliharaan perdamaian internasional dan kerja sama keamanan regional (Naidu & Ishida, 2022). Dengan demikian, selama dekade terakhir sejak ketegangan mulai meningkat, Jepang secara konsisten meningkatkan anggaran pertahanannya untuk memodernisasi *Self-Defence Force* (SDF). Modernisasi ini berfokus pada kemampuan maritim dan udara, yang mencakup perolehan teknologi canggih seperti jet tempur F-35, sistem rudal jarak jauh, dan kapal *destroyer* canggih yang dilengkapi dengan sistem Aegis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Jepang dalam memantau dan merespons aktivitas Tiongkok di sekitar wilayah yang disengketakan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, Jepang telah mengintensifkan operasi pengawasan maritim dan udara, mendirikan pos-pos baru di selatan daratan Jepang, meningkatkan kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat, dan yang terbaru mengungkapkan peningkatan drastis dalam anggaran militernya.

Pergeseran Jepang dari pasifisme terhadap modernisasi pesat SDF dan kebijakan pertahanan/keamanan yang lebih proaktif merupakan bukti peran mereka dalam memblokir dan merespons tujuan Tiongkok untuk memperluas pengaruh maritim mereka melalui *Island Chain Strategy*-nya, dan mengukuhkan peran

Jepang sebagai salah satu penghalang terbesar Tiongkok terhadap supremasi laut di kawasan ini. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada pemahaman interaksi strategis antara Tiongkok dan Jepang dalam konteks Pasifik, khususnya melalui lensa *Island Chain Strategy* Tiongkok dan respons Jepang terhadapnya. Isu ini sangat relevan dengan dinamika keamanan yang berkembang di kawasan Asia-Pasifik dimana sengketa teritorial, pergerakan militer, dan aliansi secara signifikan mempengaruhi stabilitas kawasan. Dengan menganalisis respons Jepang terhadap strategi maritim Tiongkok yang tegas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang keamanan regional dan bagaimana kebijakan keamanan suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan keamanan negara lain. Persaingan antara kedua negara besar itu tidak hanya akan berdampak pada hubungan bilateral mereka, tetapi juga dalam membentuk stabilitas Indo-Pasifik, sehingga menjadikannya area studi yang penting bagi analisis keamanan dan pembuat kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki ketertarikan pribadi yang mendalam untuk meneliti topik ini, khususnya mengenai *Island Chain Strategy* yang diimplementasikan oleh Tiongkok, sebuah topik yang hampir tidak pernah dibicarakan selama penulis belajar mengenai ilmu hubungan internasional, namun memiliki ancaman dan dampak yang signifikan bagi kawasan Asia-Pasifik. Respon Jepang yang secara drastis mengubah kebijakan pertahanan/keamanannya dan meningkatkan anggaran militernya juga menjadi hal yang menarik bagi penulis, mengingat Jepang selama ini dikenal sebagai negara yang cinta damai dalam hal militer. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis *Island Chain Strategy*

Tiongkok secara mendalam, bersama dengan respons Jepang yang menandai perubahan dalam kebijakan pertahanan dan keamanan mereka, yang relatif tidak berubah selama beberapa dekade setelah pembentukan Pasal 9 Konstitusi 1947. Dengan demikian, penelitian skripsi ini mengangkat judul **“Perubahan Kebijakan Pertahanan/Keamanan Jepang di Laut Pasifik dalam Menghadapi *Island Chain Strategy* Tiongkok.”**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis dampak *Island Chain Strategy* Tiongkok terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang, khususnya di kawasan Pasifik, dengan fokus utama pada rantai kepulauan pertama dan kedua (*first and second island chain*). Penelitian ini akan menganalisis tanggapan Jepang, khususnya terkait dengan perubahan kebijakan pertahanan mereka, seperti modernisasi militer, keamanan maritim, dan peningkatan alokasi anggaran militer. Penelitian ini akan mencakup area strategis di kawasan Pasifik seperti Laut Cina Timur, khususnya Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang disebutkan di atas, dan kepulauan di barat daya Jepang, termasuk Kepulauan Ryukyu. Hal ini berfungsi untuk membatasi cakupan geografis penelitian sehingga tidak mencakup analisis komprehensif tentang respons negara-negara lain terhadap strategi Tiongkok, kecuali jika bersinggungan atau tumpang tindih dengan kebijakan atau stabilitas Jepang, seperti Taiwan. Penelitian ini juga akan dibatasi dari tahun 2010 hingga perkembangan terbaru pada Januari 2025, yang menangkap perubahan signifikan dalam strategi maritim Tiongkok yang tegas dan kebijakan pertahanan Jepang yang terus berkembang setelah ketegangan mulai meningkat secara drastis di antara

keduanya. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah ditentukan, rumusan masalah penelitian akan terbagi dalam tiga pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana *Island Chain Strategy* Tiongkok berdampak pada upaya supremasi laut Tiongkok di wilayah Pasifik?
2. Bagaimana kebijakan pertahanan/keamanan Jepang berubah sebagai respons terhadap *Island Chain Strategy* Tiongkok?
3. Bagaimana efektivitas respons Jepang dalam mengimbangi *Island Chain Strategy* Tiongkok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengidentifikasi dampak *Island Chain Strategy* terhadap upaya supremasi laut Tiongkok di wilayah Pasifik.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana kebijakan pertahanan/keamanan Jepang berubah sebagai respons terhadap *Island Chain Strategy* Tiongkok.
- 3) Untuk menganalisis efektivitas respons Jepang dalam mengimbangi *Island Chain Strategy* Tiongkok.

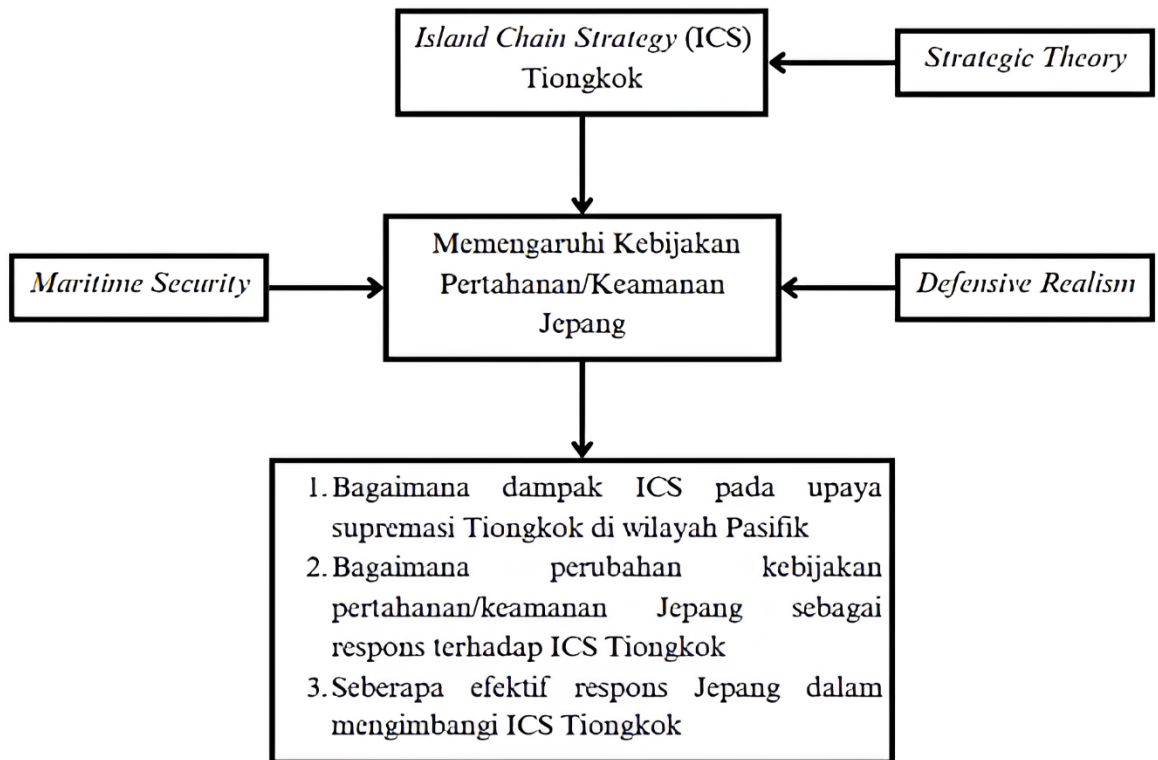
2. Manfaat Penelitian

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terkait teori *defensive realism*, *maritime security*, dan *strategic theory*. Dimana ketiga teori tersebut berdampak signifikan dalam menganalisis perkembangan ketegangan di sekitar wilayah Jepang dan Tiongkok,

yang dapat digunakan sebagai contoh dalam upaya-upaya pergerakan maritim lainnya.

- 2) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan studi mengenai kajian-kajian strategis serta keamanan maritim, sehingga dapat memberikan pandangan pada mahasiswa(i) yang ingin melanjutkan pengembangan studi mengenai hubungan kebijakan negara dengan keamanan regional.
- 3) Secara praktikal, penelitian ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan agresif suatu negara dapat berdampak pada perubahan dalam kebijakan negara lain akibat tekanan yang dirasakan negara tersebut. Selain itu, dalam memahami pola strategi kedua negara tersebut, Indonesia dapat mengambil pelajaran dalam memperkuat kapasitas pertahanan maritimnya.

D. Kerangka Konseptual



Bagan 1. 1 Alur Kerangka Konseptual

A. *Strategic Theory*

Strategic Theory adalah studi tentang bagaimana negara dan aktor memanfaatkan sumber daya, kemampuan, dan taktik yang tersedia untuk mencapai tujuan mereka dalam situasi persaingan. Berakar pada strategi militer, *strategic theory* telah berkembang untuk mencakup aplikasi yang lebih luas dalam hubungan internasional, khususnya mengenai kebijakan keamanan dan pertahanan. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana negara merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam menanggapi ancaman eksternal, menyeimbangkan kepentingan nasional mereka dengan realitas dinamika kekuatan dalam sistem internasional (Smith & Stone, 2011). Dengan menganalisis

bagaimana berbagai aktor memanfaatkan kekuatan militer, kekuatan ekonomi, aliansi, dan manuver diplomatik mereka, teori strategis membantu menjelaskan perilaku negara dalam situasi konflik, pencegahan, dan persaingan.

Seperti yang telah disebutkan, *strategic theory* memiliki relevansi yang sangat besar dalam hubungan internasional sebagai sebuah studi, karena teori ini menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk memahami bagaimana negara-negara menavigasi konflik dan perjuangan dalam lingkungan global. Dalam bidang studi ini, teori strategis sering dikaitkan dengan realisme, yang menekankan peran kekuasaan, kepentingan negara, dan kelangsungan hidup dalam sistem internasional yang anarkis. Pertama, negara-negara, sebagai aktor dalam sistem global, harus merumuskan strategi untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional mereka sambil mengelola ancaman yang ditimbulkan oleh negara lain (Frantzen & Doeser, 2022). Hal ini terutama terlihat jelas dalam persaingan antara negara-negara kuat seperti yang terjadi antara Tiongkok dan Jepang, dengan pilihan strategis masing-masing negara yang dapat mempengaruhi stabilitas regional. Dengan menerapkan kerangka kerja *strategic theory*, akan memungkinkan untuk menilai bagaimana negara-negara merumuskan kebijakan mereka, yang juga memperkuat teori ini sebagai salah satu teori fundamental dalam studi keamanan.

Inti dari *strategic theory* adalah prinsip-prinsip intinya, yaitu *triad* tiga serangkai *ends*, *ways*, dan *means*, yang membentuk dasar bagi setiap

proses pengambilan keputusan strategis. *Ends* mengacu pada tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu negara melalui strateginya, yang biasanya dibingkai dalam tujuan-tujuan terkait keamanan nasional, integritas teritorial, atau pengaruh geopolitik. Efektivitas strategi apapun bergantung pada seberapa jelas tujuan-tujuan ini didefinisikan dan dapat dicapai, sehingga menjadikannya langkah pertama dalam pengambilan keputusan strategis. *Ways* merujuk pada metode, taktik, dan pendekatan yang digunakan suatu negara untuk mencapai tujuan strategisnya, termasuk strategi militer, pembangunan aliansi, dan keterlibatan diplomatik. *Means* mengacu pada sumber daya dan kemampuan nyata yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk mengimplementasikan dan menegakkan strateginya, seperti kekuatan militer, sumber daya ekonomi, kemajuan teknologi, dan kemampuan intelijen (Smith & Stone, 2011). *Triad* ini memberikan pendekatan terstruktur untuk memahami bagaimana suatu negara merumuskan dan mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan keamanan nasional mereka, yang kemudian didukung oleh konsep-konsep lain dalam menganalisis strategi negara.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa *island chain strategy* Tiongkok merupakan aplikasi yang jelas dari *strategic theory*, karena strategi ini merupakan pendekatan yang diperhitungkan untuk memperluas pengaruh Tiongkok, mengamankan domain maritimnya, melawan kekuatan saingan di wilayah Pasifik, sekaligus memproyeksikan tujuan supremasi lautnya sendiri. Pada intinya, teori ini mengkaji bagaimana

Tiongkok dapat menggunakan sumber daya, kemampuan, dan taktik mereka untuk mencapai tujuannya dalam lingkungan yang kompetitif seperti Pasifik. Dengan menggunakan *strategic theory*, Tiongkok dapat menganalisis kemampuannya sendiri dalam mengimplementasikan, melaksanakan, dan mengembangkan strateginya. Akan tetapi, Jepang juga dapat menggunakan teori ini sebagai tanggapan untuk menciptakan respons terhadap Tiongkok, seperti yang terlihat dalam penguatan kapabilitas *deterrence*, penguatan aliansi keamanan, dan memastikan militernya kompetitif dengan militer Tiongkok di kawasan ini

B. *Defensive Realism*

Defensive realism adalah kerangka teori dalam aliran realisme dalam studi hubungan internasional, yang berpendapat bahwa negara-negara pada dasarnya berfokus untuk mempertahankan diri dan menjaga stabilitas, dibandingkan menggunakan gerakan agresif untuk memperluas kekuasaan mereka. Dalam hal ini, *defensive realism* menyatakan bahwa satu-satunya alasan negara berusaha keras untuk mengumpulkan kekuatan adalah untuk melindungi diri mereka sendiri, memperkuat militer mereka, dan bahwa langkah-langkah keamanan lainnya hanya sejauh yang diperlukan untuk menangkal ancaman, bukan untuk mendominasi negara lain di sekitar mereka (Hamilton & Rathbun, 2013).

Inti dari *defensive realism* adalah asumsinya bahwa negara adalah aktor rasional yang secara hati-hati menilai risiko dan biaya yang terkait akan kebijakan pertahanan dan keamanan mereka. Penganut teori ini

berpendapat bahwa ekspansi kekuatan yang tidak terkendali seringkali tidak diperlukan dan berbahaya, dikarenakan dapat mengundang perlawanan dari negara-negara lain, oleh karena itu negara-negara yang mengikuti *defensive realism* terlibat dalam penyeimbangan strategis yang terukur untuk memastikan keamanan mereka tanpa memicu konflik yang berlebihan (Juneau & Mallett, 2023).

Defensive realism juga menekankan pada konsep *security dilemma* sebagai salah satu prinsipnya, yang menggambarkan situasi di mana tindakan defensif suatu negara, seperti meningkatkan pengeluaran militer atau meningkatkan kemampuan *deterrence*, dianggap sebagai tindakan ofensif atau agresif oleh negara lain, yang mengarah pada peningkatan ketegangan dan perlombaan senjata. Untuk mengelola dilema ini, realisme defensif menekankan pentingnya menahan diri dan keterlibatan diplomatik (Qazi & Khalid, 2021). Namun dalam kasus hubungan Jepang dan Tiongkok, peningkatan kemampuan militer Jepang sebagai respons terhadap agresi Tiongkok justru memperburuk situasi. Seiring dengan *security dilemma*, *defensive realism* juga menegaskan bahwa faktor geopolitik dan persaingan historis membentuk postur keamanan suatu negara terhadap negara lain. (Reichwein, 2024). Ini berarti bahwa negara yang dikelilingi oleh aktor-aktor yang bermusuhan atau menghadapi sengketa teritorial lebih mungkin untuk mengembangkan kemampuan pencegahan yang lebih kuat, dengan tujuan utama pertahanan dan keamanan diri.

Melalui pengamatan sederhana terhadap respons Jepang sejauh ini terhadap meningkatnya agresi Tiongkok di wilayah tersebut, dapat dilihat bahwa respons Jepang berfungsi sebagai contoh utama *defensive realism* dalam praktiknya. Ketika Tiongkok memperluas kehadiran militernya di wilayah tersebut, Jepang menganggap hal ini sebagai tantangan dan ancaman langsung terhadap integritas teritorialnya, seperti yang terlihat dari berbagai perselisihan teritorial, dan juga terhadap stabilitas regional. Meskipun fokus Jepang baru-baru ini pada modernisasi militer dan penguatan aliansi militer mereka tampaknya tidak masuk akal dari pendekatan pasifis mereka sebelumnya terhadap keamanan regional, *defensive realism* akan setuju bahwa respons mereka sepenuhnya dapat dibenarkan dan bersifat rasional.

Selama Jepang bertujuan untuk mempertahankan status quo di kawasan ini dan untuk menjaga keamanan nasionalnya dengan meningkatkan kemampuan pertahanan dan kerja sama militernya, Tiongkok dapat melihatnya sebagai upaya blokade yang berpotensi menyebabkan eskalasi lebih lanjut dari situasi ini. Akan tetapi, karena strategi keseluruhan Jepang tetap berada dalam kerangka kerja *defensive realism* dan menghindari konflik langsung, respons mereka dapat berfungsi sebagai pencegahan yang tepat terhadap Tiongkok. Oleh karena itu, pendekatan *defensive realism* dapat membantu analisis yang lebih dalam terkait respons Jepang secara keseluruhan.

C. *Maritime Security*

Maritime security atau keamanan maritim mengacu pada perlindungan perairan teritorial, perbatasan maritim, dan kegiatan ekonomi berbasis laut dari ancaman yang berpotensi merusak keamanan dan stabilitas nasional, sebuah konsep yang sering ditemukan dalam studi keamanan dan strategis. Konsep ini sendiri mencakup upaya untuk melindungi wilayah pesisir, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan jalur laut internasional dari ancaman tradisional dan non-tradisional (Bosilca, Ferreira, & Ryan, 2022). Keamanan maritim sangat penting untuk memastikan navigasi yang aman, melindungi rute perdagangan dan perairan teritorial, mencegah kegiatan ilegal, dan mempertahankan penangkalan angkatan laut terhadap negara lain. Selain itu, keamanan maritim juga melibatkan penegakan hukum maritim internasional seperti yang diuraikan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) untuk mengatur klaim teritorial dan menyelesaikan sengketa. Meskipun sebagian besar mengacu pada operasi dan fenomena militer, ruang lingkup keamanan maritim itu sendiri melampaui operasi militer.

Cakupan keamanan maritim juga mencakup penegakan hukum, keamanan ekonomi, dan perlindungan lingkungan terkait hukum maritim. Dengan demikian, angkatan laut dan Penjaga Pantai suatu negara memainkan peran kunci dalam mengamankan perairan nasional mereka, menangkal ancaman eksternal, dan merespons jenis ancaman lain seperti pembajakan atau penangkapan ikan ilegal. Selain itu, keamanan maritim

juga mencakup kontraterorisme, perdagangan manusia, pencegahan penyelundupan, ancaman keamanan siber terhadap infrastruktur angkatan laut dan pelayaran, serta operasi pengawasan dan pengumpulan intelijen untuk memantau jalur dan wilayah perairan strategis (Sinay SAS, 2024). Bagian terakhir secara khusus, akan memainkan peran besar dalam ketegangan maritim Jepang dan Tiongkok. Ketika melihat cakupan luas keamanan maritim, akan sulit untuk tidak melihat berbagai ancaman yang menyertai sifatnya yang luas, dimana sebuah negara harus menghadapi berbagai ancaman yang sama luasnya, baik tradisional maupun non-tradisional.

Ancaman ini, yang jumlahnya sangat banyak, berasal dari aktor negara dan non-negara dan seringkali melibatkan sengketa teritorial, konfrontasi militer, pembajakan, kejahatan terorganisir, dan tantangan teknologi yang muncul. Oleh karena itu, untuk memastikan keamanan maritim, negara diharuskan untuk mengatasi ancaman yang terus berkembang ini melalui pertahanan angkatan laut, penegakan hukum, dan kerja sama internasional. Ancaman non-negara biasanya terjadi dalam bentuk pembajakan, kejahatan terorganisir, dan penangkapan ikan IUU (*illegal, unreported, and unregulated*) (Pandey, 2023). Namun, meskipun ancaman dari aktor non-negara dapat merugikan suatu negara dalam jangka pendek, ancaman dari aktor negara seringkali menyebabkan kerugian yang lebih besar dan lebih berdampak bagi semua negara yang terlibat. Ancaman ini seringkali muncul ketika negara-negara bersaing untuk menguasai

wilayah maritim demi kepentingan strategis, ekonomi, dan geopolitik mereka. Ancaman yang melibatkan aktor negara dapat meningkat menjadi konflik militer, perlombaan senjata, dan mengganggu kestabilan di wilayah sekitar negara yang terlibat. Ancaman ini berkisar pada sengketa teritorial, eskalasi militer, kontrol jalur air strategis, dan persaingan angkatan laut di perairan yang disengketakan.

Dalam menanggapi *Island Chain Strategy* Tiongkok, Jepang telah mengubah kebijakan pertahanan mereka secara signifikan, dengan penekanan besar pada keamanan maritim mereka. Karena konflik terjadi terutama di wilayah Pasifik, khususnya Laut Cina Timur, respons Jepang mencakup perlindungan wilayah perairan mereka, seperti memperkuat upaya keamanan maritimnya melalui modernisasi militer dan peningkatan pengawasan, yang semuanya bertujuan untuk menghalangi asertifitas Tiongkok di wilayah tersebut. Mengetahui lebih dalam dan menggunakan pendekatan *maritime security* selama penelitian ini dapat membantu peneliti dalam menganalisis respons Jepang dengan lebih dalam, terutama dalam upayanya meningkatkan kapabilitas maritimnya secara drastis, sebagai salah satu bagian militernya yang ditekankan selama modernisasi dan peningkatan anggaran.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah studi tentang fenomena yang meliputi kualitas dan manifestasi. Penelitian kualitatif biasanya mencakup data berbentuk kata-kata dan bukan berbentuk angka untuk dapat lebih memahami ide, opini, atau pengalaman. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena sosial yang terjadi. Untuk dapat memahami fenomena sosial yang terjadi, penelitian kualitatif menggunakan studi kasus, studi literatur, analisis historis, dan analisis wacana (Yadav, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus hubungan Jepang dan Tiongkok berkaitan dengan upaya supremasi naval Tiongkok, yang berdampak pada kebijakan pertahanan/keamanan Jepang serta wilayah regional sekitar.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder melalui studi literatur tentang hubungan Jepang dan Tiongkok berkaitan dengan *island chain strategy* Tiongkok serta respons Jepang terhadap strategi tersebut, berdasarkan dari literatur yang telah ada seperti jurnal, buku, artikel, serta sumber kredibel lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review* atau studi literatur dan wawancara. Teknik pengumpulan data studi literatur pada penelitian ini diperoleh dari sumber bacaan berupa buku, jurnal, dan/atau artikel *website* terkait dengan hubungan Jepang dan Tiongkok dalam rana pertahanan/keamanan sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Sedangkan, wawancara dengan informan kunci akan dilakukan sebagai pendukung argumen terkait dengan respons Jepang terhadap upaya supremasi laut Tiongkok.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data-data terkait dengan hubungan dan ketegangan antara Jepang dan Tiongkok. Kemudian, penulis akan menganalisis fakta-fakta dari data yang telah dikumpulkan, dan menarik satu kesimpulan yang menjelaskan bagaimana Tiongkok telah berdampak pada perubahan dalam kebijakan pertahanan/keamanan Jepang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Strategic Theory*

Dalam konteks ilmu hubungan internasional, strategi mengacu pada penggunaan yang terencana dari cara-cara politik, militer, ekonomi, dan diplomatik oleh negara-negara untuk mencapai kepentingan nasional mereka dan menjaga keamanan dalam sistem internasional yang anarkis (Howard, 1976). Strategi tidak terbatas pada aksi militer saja, namun juga melibatkan perencanaan jangka panjang dan tindakan yang diperhitungkan untuk mempengaruhi perilaku negara lain, menghalangi potensi ancaman, dan melindungi kedaulatan nasional negara. Konsep strategi dalam hubungan internasional sendiri sangat erat kaitannya dengan teori realis, yang memandang sistem internasional negara-negara harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, negara akan merumuskan strategi untuk menyeimbangkan kekuatan dan memperkuat pengaruh mereka tidak hanya untuk melindungi kepentingan nasional mereka, namun juga untuk melakukan *power projection* dari pengaruh mereka sendiri (Baylis, Wirtz, & Johnson, 2022). Hal ini terlihat jelas dalam pembentukan *Island Chain Strategy* oleh Tiongkok, sebagai bagian dari strategi besar mereka untuk memproyeksikan pengaruh di wilayah tersebut dan mencapai supremasi angkatan laut di lautan sekitar wilayah mereka. Dalam hal ini, *strategic theory* hadir sebagai sebuah

framework bagi negara untuk meninjau sumber daya dan kapabilitas mereka sendiri dalam kaitannya dengan strategi yang dapat mereka ambil dan terapkan.

Seperti yang telah diangkat dalam Bab 1, *strategic theory* adalah konsep dalam studi keamanan yang membahas mengenai bagaimana sebuah negara menggunakan kekuatan militer, diplomasi, dan sumber daya untuk mencapai tujuan politik dan menjaga keamanan nasionalnya. Teori ini berfokus pada hubungan antara *ends*, *ways*, dan *means* dalam merancang strategi pertahanan. Teori ini sendiri berakar pada berbagai konsep dari teori militer, strategis, dan hubungan internasional baik klasik ataupun modern, yang diambil dari analisis historis tentang peperangan, ketatanegaraan, dan politik kekuasaan. Dengan akar ini, pemikiran Carl von Clausewitz sangat dianggap sebagai fondasi utama dari *strategic theory*, serta Alfred Thayer Mahan dan Juliet Corbett sebagai kontributor *strategic theory* yang secara khusus berkaitan dengan kemaritiman.

Untuk memulai, Carl von Clausewitz dalam karya seminalnya pada tahun 1832 berjudul "*On War*", meletakkan fondasi untuk memahami perang dan strategi dari perspektif politik dan militer. Menurut karyanya, strategi adalah penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik, yang sejalan dengan pernyataannya yang terkenal bahwa perang hanyalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Clausewitz juga mendefinisikan strategi sebagai penggunaan tindakan-tindakan tertentu untuk tujuan perang, melihat bahwa strategi tidak terbatas pada taktik medan perang, tetapi juga melibatkan bagaimana tindakan militer direncanakan dan dieksekusi untuk mencapai tujuan politik yang lebih luas (Strachan, 2022). Sebagai instrumen yang dipandu oleh kepemimpinan politik, Clausewitz menyebutkan

bahwa penggunaan kekuatan militer harus menyelaraskan tujuan, cara, dan sarana yang digunakannya dengan tujuan politiknya, yang sekarang dikenal sebagai *ends-ways-means framework* sebagian bagian inti dari *strategic theory*.

Clausewitz juga menyumbangkan konsep-konsep lain ke dalam bidang studi strategis, seperti konsep *paradoxical trinity*, *center of gravity*, dan konsep "fog of war" dan "friction", di mana dalam *strategic theory*, *center of gravity* memainkan peran penting dalam memahami pendekatan strategis suatu negara. *Center of gravity* Clausewitz mengacu pada sumber kekuatan musuh atau kelemahan kritis mereka, di mana mengidentifikasi dan menargetkan *center of gravity* ini sangat penting untuk melemahkan posisi musuh dan mencapai keunggulan strategis (Meyer, 2022). Dalam konteks *Island Chain Strategy* Tiongkok, fiksasi mereka terhadap mengendalikan kepulauan Senkaku/Diaoyu dapat dilihat sebagai Tiongkok telah menandai kepulauan tersebut sebagai *center of gravity* tidak hanya sebagai pijakan untuk memproyeksikan kekuatan angkatan laut Beijing dan mengendalikan jalur laut di sekitar wilayah tersebut, tetapi juga mempertimbangkan kepulauan tersebut sebagai bagian penting dari keamanan laut Jepang, di mana mengendalikan kepulauan tersebut dapat melemahkan kemampuan Jepang untuk melakukan survei dan patroli di perairan sekitar secara signifikan.

Seperti yang telah disebutkan di awal subbab, jika pemikiran Clausewitz berperan sebagai landasan utama dari *strategic theory*, Mahan dan Corbett secara khusus memiliki peran dalam menciptakan landasan maritim dalam *strategic theory*. Mahan berpendapat bahwa kekuatan dan pengaruh global suatu negara secara langsung terkait dengan kemampuannya untuk mendominasi laut, oleh

karena itu, kontrol atas rute maritim, superioritas angkatan laut, dan akses ke titik-titik strategic sangatlah penting untuk mengamankan keamanan nasional dan mencapai dominasi geopolitik (Podsoblyayev, 2005). Mahan percaya bahwa laut adalah area strategis di mana keseimbangan kekuatan antar negara ditentukan, di mana kemampuan negara untuk memproyeksikan kekuatan dan melindungi kepentingan nasionalnya sangatlah bergantung pada kekuatan angkatan laut dan kontrol yang mereka miliki atas jalur laut global di wilayah sekitarnya.

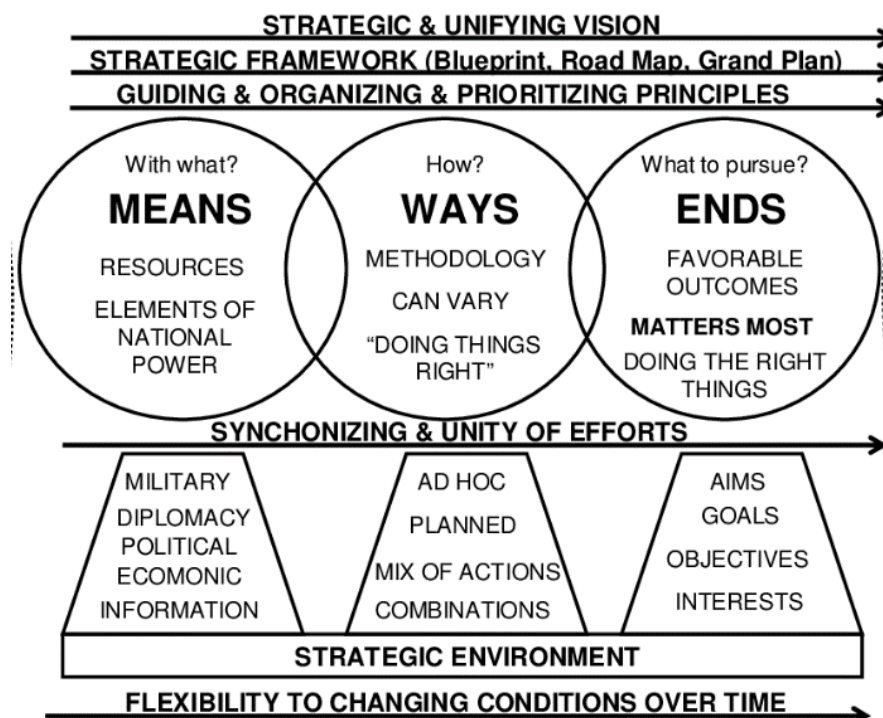
Berdasarkan gagasan Mahan tentang kekuatan laut dan dominasi angkatan laut, Corbett berfokus pada konsep "*command of the sea*" sebagai strategi terbatas dan fleksibel yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik tanpa memerlukan konflik angkatan laut secara total. "*Command of the sea*" didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan ruang maritim strategis dan membatasi pergerakan pasukan musuh di perairan tersebut. Namun, tidak seperti Mahan yang menekankan pada dominasi angkatan laut total melalui konflik langsung, Corbett berpendapat bahwa untuk mencapai dominasi angkatan laut tidak membutuhkan konflik langsung dengan kekuatan angkatan laut musuh, melainkan melalui pengendalian jalur laut utama, pos-pos pemeriksaan maritim, dan rute maritim untuk mencapai tujuan politik dan strategis (Livsey, 2022). Meskipun pemikiran Clausewitz, Mahan, dan Corbett berkaitan erat dengan *framework ends-ways-means*, di mana Clausewitz berfokus pada *ends*, Corbett pada *means* strategis untuk mencapai tujuan tersebut, dan Mahan pada penggunaan kekuatan angkatan laut dan dominasi sebagai *ways* untuk mencapai tujuan tersebut, kita belum mengetahui

mengapa *framework* tersebut merupakan bagian terpenting dari *strategic theory* secara keseluruhan.

Sebelum membahas triad *ends-ways-means framework* sebagai konsep utama dalam *strategic theory*, penting untuk dicatat bahwa meskipun Clausewitz, Mahan, dan Corbett memainkan peran penting dalam fondasi *strategic theory* dan studi strategis, kedua teori ini berkaitan, namun sangat berbeda dengan satu sama lain. *Strategic theory* dapat digunakan dalam bidang apapun yang membutuhkan kerangka kerja strategis baik itu ekonomi, politik, atau keamanan. Dalam konteks studi keamanan, keduanya berusaha untuk memahami penggunaan kekuatan, penangkalan, dan kekuasaan dalam urusan global dan internasional, namun fokus dan pendekatannya pada dasarnya berbeda. *Strategic theory* adalah kerangka kerja konseptual yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar strategi, perang, dan keamanan melalui analisis dengan menggunakan *framework ends-ways-means*, sedangkan studi strategis sendiri adalah disiplin akademis yang berfokus pada penerapan strategi secara empiris dalam konteks historis dan geopolitik tertentu (Yarger, 2006). Sederhananya, *strategic theory* menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk menganalisis logika fundamental di balik keputusan strategis suatu negara, dalam hal ini mengenai *Island Chain Strategy* Tiongkok, dan respons strategis Jepang terhadapnya.

Seperti yang telah dijelaskan singkat dalam Bab 1, *framework ends-ways-means* sebagai kerangka kerja adalah konsep inti dari *strategic theory*, yang bertindak sebagai cara utama untuk menganalisis teori negara dalam menyelaraskan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, metode atau cara yang diambil untuk

mencapai sasaran tersebut, dan kemampuan atau sarana yang tersedia untuk mendukung strategi tersebut. Dengan memastikan bahwa ketiga elemen ini terhubung, kerangka kerja ini memungkinkan para pembuat kebijakan dan ahli strategi militer untuk merancang strategi yang efektif dan realistis. Gambaran ringkas dari *framework ends-ways-means* adalah seperti berikut:



Gambar 2.1 Ends-Ways-Means Framework
Sumber: (Cepeda, 2008)

Ends atau tujuan mengacu pada tujuan akhir, atau hasil yang ingin dicapai oleh negara melalui strategi tersebut. Dalam konteks kebijakan pertahanan, tujuan-tujuan ini dapat mencakup penjaminan keamanan nasional, menangkal ancaman eksternal, menjaga stabilitas regional, atau penggunaan pengaruh politik. Kunci keberhasilan strategi yang menggunakan kerangka kerja ini adalah mendefinisikan dengan jelas tujuan atau sasaran sejak awal, dikarenakan tujuan tersebut yang akan memandu pemilihan metode atau cara-cara, serta alokasi sumber daya atau sarana

(Moon, 2024). Tanpa definisi yang jelas, strategi akan menjadi tidak terarah dan berisiko menghabiskan sumber daya atau meningkatkan konflik secara cuma-cuma. Sebagai bagian dari kerangka kerja, *ends* juga harus realistis dan terukur, yang berarti bahwa para penyusun strategi atau pembuat kebijakan perlu memahami apa yang ingin mereka capai, mengapa hal tersebut penting, dan bagaimana keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut akan didefinisikan.

Ways mengacu pada metode atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari kerangka kerja, *ways* menjawab pertanyaan tentang bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berfokus pada tindakan strategis, taktik, kebijakan yang akan digunakan, serta metode operasional yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Miller, Rogers, Park, Owen, & Meiser, 2017). Sama halnya dengan bagaimana seorang ahli strategi atau pembuat kebijakan menentukan tujuan, pemilihan *ways* atau cara sangat dipengaruhi alasan dan lingkungan politik, keberadaan ancaman, dan sumber daya yang tersedia untuk dimanfaatkan. Pada intinya, *ways* dalam kerangka kerja *strategic theory* digunakan untuk menciptakan strategi dan metode yang tepat, yang menghubungkan sumber daya tersedia dengan tujuan yang diinginkan. Seperti halnya bagaimana mendefinisikan tujuan dalam menetapkan sasaran yang jelas sangat krusial, tanpa *ways* yang jelas dan efektif untuk mencapainya, bahkan sumber daya dan kapabilitas yang paling canggih sekalipun dapat terbuang percuma, dan tujuan yang diinginkan tetap tidak dapat dicapai.

Berbeda dengan gambaran *framework ends-ways-means* oleh Cepeda yang tertera di atas, penulis penelitian ini berpendapat bahwa aspek *means* merupakan aspek yang paling vital dari tiga serangkai tersebut, mengingat tidak peduli seberapa baik tujuan dan pendekatan yang telah ditetapkan, hal tersebut akan tetap gagal apabila tidak didukung oleh sumber daya, kapabilitas, dan manajemen yang memadai. *Means* mengacu pada sumber daya, kemampuan, dan alat yang tersedia bagi negara untuk mendukung pendekatan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari kerangka kerja tersebut, *means* menjawab pertanyaan dengan apa negara akan mencapai tujuan mereka. *Means* dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada sifat strategi yang didefinisikan, di mana dalam konteks strategi militer atau kebijakan pertahanan, *means* seringkali mencakup angkatan bersenjata, teknologi canggih, jaringan intelijen, kemampuan logistik, serta sumber daya keuangan (Eikmeier, 2007). Sebuah negara yang ingin meningkatkan postur pertahanannya harus memastikan bahwa negara tersebut memiliki militer yang lengkap dan terlatih, persenjataan yang dimodernisasi, dan rantai suplai yang efisien untuk menopang operasi mereka. Dalam aspek yang lebih luas, kemampuan untuk melakukan negosiasi diplomatic dan menggunakan pengaruh politik terhadap negara lain juga dapat dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain sumber daya material dan politik, sarana strategis yang sering diabaikan yaitu geografi, yang merupakan faktor penentu dalam permainan kekuatan geopolitik.

Ketika melihat melalui lensa maneuver geopolitik, terlihat bagaimana geografi memainkan peran yang penting dalam kerangka kerja dan keberhasilan

suatu strategi, karena secara langsung mempengaruhi kemampuan strategis, posisi militer, dan akses logistik suatu negara. Geografi berfungsi sebagai aset strategis ataupun batasan strategis yang melekat pada sebuah negara, yang mempengaruhi bagaimana sebuah negara dapat menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuannya. Akses suatu negara ke lokasi geografis, kedekatannya dengan negara saingan, akses ke rute perdagangan maritim, dan kontrol atas titik-titik strategis, semuanya membentuk cara negara itu merumuskan dan melaksanakan strategi yang direncanakannya (Moran, *Geography and strategy*, 2016). Dengan mempertimbangkan *Island Chain Strategy* Tiongkok dan penekanannya terhadap penguasaan Kepulauan Senkaku/Diaoyu, kita dapat melihat seberapa besar peran aset geografis dalam mencapai tujuan negara.

Dalam artikel jurnalnya yang berjudul “*Strategic Theory and the History of War*”, Daniel Moran memberikan argumen yang memperkuat penerapan *strategic theory* bersifat kekal, atau dapat terus digunakan sepanjang masa. Moran mengatakan bahwa meskipun sifat konflik telah berubah, logika dasar strategi tetap konstan, yang membutuhkan penyempurnaan secara terus menerus, daripada menciptakan sebuah konsep yang baru dan terpisah dari konsep yang telah ada. Argumen utamanya adalah bahwa *strategic theory* adalah proses intelektual berkelanjutan dan bukan seperangkat aturan yang statis. Hal ini berarti bahwa teori ini berkembang seiring dengan perubahan sejarah, teknologi, dan politik. Hal ini menekankan bahwa *strategic theory* bukanlah doktrin yang tetap, melainkan kerangka kerja yang dapat diadaptasi, dan bahwa *framework ends-ways-means* bersifat fleksibel sesuai dengan realitas strategis yang terus berubah, berperan

sebagai fondasi untuk memahami pengambilan keputusan strategis. (Moran, *Strategic Theory and the History of War*, 2001). Argumen ini mendukung relevansi *strategic theory* hingga pada zaman kini.

Dengan mempertimbangkan semua hal-hal tersebut, *strategic theory* memberikan pendekatan terstruktur untuk menganalisis implementasi *Island Chain Strategy* Tiongkok dengan menawarkan sebuah kerangka kerja untuk membantu pemahaman bagaimana Tiongkok merumuskan tujuan, memilih metode, dan memobilisasi sumber dayanya untuk mencapai dominasi regional, terutama di sepanjang Rantai Pulau Pertama dan Kedua. Juga sebagai alat untuk menilai perilaku strategis, *strategic theory* dan *framework ends-ways-means* secara khusus menyoroti bagaimana ekspansi maritim Tiongkok bukan hanya maneuver militer, tetapi juga strategi geopolitik yang lebih besar, dengan tujuan untuk mengubah *balance of power* di kawasan Pasifik. Dengan demikian, penggunaan *strategic theory* dapat sangat membantu dalam penelitian ini, yang mengarah pada analisis yang tidak berpihak dan jelas mengenai *Island Chain Strategy* Tiongkok.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai tanggapan terhadap *Island Chain Strategy* Tiongkok, Jepang mulai mengubah perspektif mereka di sektor pertahanan, terutama dalam hal kebijakan pertahanan mereka. Karena sifat dari perubahan itu yang merupakan respons terhadap ancaman dari Tiongkok, maka wajar jika kita mengasumsikannya sebagai tindakan yang bersifat defensif, dan dengan demikian, menggunakan teori keamanan defensif untuk menganalisis respons Jepang merupakan hal yang ideal. Salah satu teori tersebut adalah *defensive*

realism—sebuah cabang dari teori realisme yang memprioritaskan keamanan negara dengan berfokus pada kemampuan pertahanan.

B. Konsep *Defensive Realism*

Defensive realism merupakan salah satu cabang dari teori realisme yang lebih luas, dan lebih khususnya lagi sebagai varian dari realisme struktural dalam ilmu hubungan internasional, yang berpendapat bahwa negara-negara pada dasarnya lebih mengutamakan keamanan dan kelangsungan hidupnya daripada memaksimalkan kekuatan mereka untuk mendominasi negara-negara di sekitarnya. Berbeda dari *offensive realism* yang mengasumsikan bahwa negara-negara secara alami bersifat agresif dan terus menerus berusaha untuk mendominasi sekitarnya, *defensive realism* menunjukkan bahwa negara-negara bertindak dengan hati-hati, menyeimbangkan kebutuhan keamanan mereka sambil menghindari konflik yang tidak perlu yang dapat memicu respons negatif (Adams, 2003). Oleh karena ini, penganut *defensive realism* berpendapat bahwa negara-negara tidak melakukan ekspansi secara sembarangan, dikarenakan hal itu seringkali memicu upaya penyeimbangan dari negara lain, yang kemudian akan berakhir dengan situasi perlombaan senjata di antara keduanya. Melainkan, negara-negara cenderung memprioritaskan strategi defensif seperti *deterrence* atau penangkalan, aliansi militer, dan upaya-upaya lainnya untuk menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan nasional. Sebagai cabang dari teori realis, *defensive realism* sangat relevan dengan strategi keamanan dan strategi militer.

Relevansinya dapat dikaitkan dengan kerangka kerja yang disediakan untuk memahami bagaimana negara dapat menavigasi ancaman dan menjaga

stabilitas dalam sistem internasional yang dianggap anarkis. Dalam studi keamanan, *defensive realism* berfokus pada bagaimana negara melindungi diri mereka sendiri dari bahaya eksternal, di mana pandangan *defensive realism* tentang cara negara berfokus pada tindakan pertahanan sangatlah penting untuk menganalisis tantangan keamanan modern, menyoroti alasan mengapa negara lebih memprioritaskan pertahanan diri tanpa melakukan agresi terus-menerus. Di dalam strategi militer, ini menjelaskan bagaimana negara merumuskan kebijakan pertahanan, menyusun struktur militer mereka, dan mengembangkan langkah-langkah pencegahan untuk memastikan kelangsungan hidup dalam lingkungan global yang kompetitif. Mempertimbangkan bagaimana negara-negara modern sangat tidak menyukai ekspansionisme agresif, apalagi ketika kita melihat kasus-kasus seperti invasi Rusia ke Ukraina, dan tekanan Tiongkok terhadap Taiwan, penekanan teori ini pada respons defensif terhadap ancaman semacam itu selaras dengan skenario dunia nyata tersebut. Dengan demikian, penggunaan teori ini sebagai dasar dalam membentuk doktrin militer dan kebijakan pertahanan, memungkinkan negara untuk menganalisis risiko ekspansi berlebihan dan manfaat dari pengendalian diri dalam ekspansi, yang berfungsi sebagai panduan bagi negara untuk menjaga keamanan sekaligus meminimalkan aksi-aksi militer yang tidak diperlukan (Tabak, 2025).

Sepanjang perkembangannya, beberapa ahli terkemuka telah berkontribusi dalam *defensive realism* sebagai sebuah teori, masing-masing menekankan aspek-aspek yang berbeda tentang bagaimana negara mencari keamanan melalui langkah-langkah pertahanan. Kenneth Waltz, Stephen Van Evera, dan Charles Glaser adalah di antara para ahli yang paling berpengaruh dalam mendefinisikan dan

mengembangkan teori ini. Meskipun ketiganya setuju pada gagasan inti *defensive realism*, mereka berbeda dalam penafsiran bagaimana negara menavigasi *security dilemma*, *balance of power*, dan konsep-konsep lain yang dikemukakan dalam teori tersebut.

Secara umum dianggap sebagai pendiri realisme struktural serta cabangnya, *defensive realism*, buku Kenneth Waltz berjudul "*Theory of International Politics*" pada tahun 1979 memperkenalkan gagasan bahwa struktur sistem internasional menentukan perilaku negara. Dan dikarenakan sistem ini anarkis, maka negara berdaulat harus bergantung pada kemampuannya sendiri untuk menjamin keamanan nasional melalui upaya-upaya yang bersifat defensif ketimbang dari ekspansionis. Waltz berargumen bahwa ekspansi agresif seringkali bersifat kontraproduktif, dikarenakan dapat memicu respons penyeimbangan dari negara lain, dimana negara yang lebih lemah akan merasa terancam, dan akan berupaya untuk melawan ancaman tersebut melalui penguatan militer dan membentuk aliansi pertahanan (Telbami, 2002). Waltz melihat hal ini sebagai mekanisme *balance of power*, yang mencegah ekspansi yang berlebihan dan oleh karena itu menjadi salah satu ciri khas dalam politik internasional.

Argumen lain dari Waltz adalah bahwa negara-negara pada dasarnya lebih mementingkan mempertahankan *status quo* yang ada daripada mengganggu *status quo* tersebut, di mana mereka memilih untuk tidak terlibat dalam konflik langsung kecuali jika mereka melihat adanya ancaman terhadap eksistensi nasional atau tantangan langsung terhadap kepentingan strategis mereka. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan mengapa sebagian besar negara cenderung mengadopsi

kebijakan keamanan berbasis *deterrence*, berfokus pada solusi diplomatik, dan terlibat dalam pembangunan persekutuan daripada melancarkan perang preemptif dengan satu sama lain (Waltz, 2000).

Stephen Van Evera kemudian melanjutkan pemahaman *defensive realism* Waltz dalam bukunya yang berjudul "*Causes of War: Power and the Roots of Conflict*" pada tahun 1999, di mana Evera berargumen bahwa perang seringkali merupakan hasil dari kesalahan persepsi dan adanya *security dilemma* yang dapat dihindari, bukan dikarenakan ambisi ekspansionis yang disengaja. Oleh karena itu, upaya saling menyeimbangi *offense-defence* antar negara dapat membentuk perilaku negara. Selain pentingnya keseimbangan tersebut, Evera juga menyoroti bahwa geografi dan teknologi militer memainkan peran penting dalam menentukan keseimbangan tersebut. Secara khusus, teknologi militer yang mendukung pertahanan sebuah negara dan melengkapi geografi alamiahnya dapat mencegah negara lain untuk mengambil aksi yang agresif (Evera, 1999).

Yang terakhir, dengan membangun di atas pandangan Waltz dan Evera mengenai *defensive realism*, Charles Glaser memperkenalkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang bagaimana negara menilai ancaman dan meresponsnya, tidak hanya melalui penyeimbangan militer tetapi juga melalui kerja sama dan diplomasi yang selektif. Dalam bukunya yang berjudul "*Rational Theory of International Politics*" tahun 2010, Glaser berpendapat bahwa negara-negara tidak selalu terkunci dalam persaingan, di mana terkadang dapat menemukan cara untuk mengurangi ketegangan antar sesama melalui penilaian strategis akan kondisi geopolitik sekitar. Argumen utama yang dimiliki Glaser mengenai *defensive realism*

adalah konsep *contingent realism*, atau realisme kontingen, yang menyatakan bahwa tingkat keseriusan *security dilemma* bergantung pada bagaimana negara menafsirkan niat pihak lain, di mana negara tersebut dapat mengasumsikan bahwa saingannya bisa saja menginginkan solusi kooperatif apabila mereka percaya bahwa negara tersebut pada dasarnya tidak agresif (Glaser, 2010). Namun, kesalahan dalam penafsiran tersebut dan mengasumsikan tindakan defensif sebagai ofensif dapat meningkatkan ketegangan lebih lanjut, yang dapat dilihat pada peningkatan agresi Tiongkok terhadap Jepang setelah pembangunan militer Jepang.

Seperti yang terlihat dari pandangan ketiga ahli tersebut, *defensive realism* berbeda dengan *offensive realism* dalam hal bagaimana mereka menginterpretasikan perilaku negara-negara berdaulat di bawah sistem yang anarkis. Meskipun kedua perspektif tersebut mengakui bahwa sistem internasional dunia bersifat anarkis, dan negara-negara memprioritaskan kelangsungan dan keamanannya masing-masing, pandangan keduanya akan bagaimana negara-negara tersebut mencapai tujuan itu berbeda dari satu sama lain. *Defensive realism* lebih mengupayakan upaya keamanan dan pertahanan, dimana *offensive realism* mengedepankan pemaksimalan kekuatan. Berdasarkan perbedaan tersebut, kita dapat melihat bagaimana *offensive realism* dibangun di atas tiga prinsip utama yang menjelaskan mengapa negara memprioritaskan keamanan dan stabilitas, yaitu: anarki dan upaya pencarian keamanan, *security dilemma*, dan *balance of power*.

Prinsip pertama, yaitu anarki dan upaya pencarian keamanan, merupakan pemikiran paling mendasar dalam *defensive realism*, dan telah dibahas secara singkat sebelumnya. Pada dasarnya anarki dan upaya pencarian keamanan adalah

prinsip yang meyakini bahwa negara-negara tidak ekspansionis, dimana mereka hanya ingin mengamankan wilayah, keamanan, dan menghindari konflik yang tidak perlu terjadi. Prinsip ini percaya bahwa negara-negara menyadari risiko dari perilaku ekspansi yang berlebihan, dan oleh karena itu berfokus pada pemeliharaan *status quo* yang stabil dalam sistem internasional (Taliaferro, 2000). Prinsip ini menjelaskan mengapa banyak negara di era modern yang memprioritaskan stabilitas mereka sendiri daripada menaklukkan negara-negara lain, lebih memilih untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan daripada mengubah keseimbangan tersebut. Contohnya, melalui upaya terhitung seperti *deterrence*, pembangunan militer yang cermat, dan mementingkan diplomasi dengan negara-negara sekutu. Namun meskipun negara-negara memiliki prinsip defensif, tindakan militer apapun seperti *deterrence* dan pembangunan militer tetap akan menyebabkan adanya kesalahan asumsi di antara negara-negara lain, yang kemudian akan menyebabkan *security dilemma*.

Security dilemma, merupakan prinsip kedua dalam *defensive realism* yang menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri masih dapat secara tidak sengaja menciptakan ketakutan dan ketegangan di antara negara sekitarnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kesalahan tafsir, atau ketegangan terdahulu antara negara-negara yang terlibat, yang akhirnya mengarah pada siklus ketidakpercayaan dan terjadinya eskalasi. Dikarenakan negara-negara tidak dapat memastikan tujuan jangka panjang suatu sama lain, mereka seringkali mengasumsikan yang terburuk dan mengambil tindakan balasan untuk mencegah kelengahan, dimana tindakan tersebut

diasumsikan oleh negara lain sebagai ancaman, yang kemudian mendorong eskalasi militer (Glaser, 1997). Seiring waktu, kedua belah pihak bisa saja menemukan diri mereka terkunci dalam perlombaan senjata atau ketegangan militer yang terus meningkat, seperti yang dapat dilihat pada situasi Tiongkok dan Jepang saat ini, dimana peningkatan tindakan balasan Jepang terhadap Tiongkok mendorong eskalasi dalam agresi Tiongkok di wilayah tersebut. Dalam keadaan *security dilemma* yang menghasilkan persaingan dan agresi antar negara-negara yang terlibat, masuklah konsep *balance of power* sebagai salah satu prinsip *defensive realism*.

Prinsip ketiga dan terakhir dari *defensive realism* adalah sebuah konsep yang dikenal luas di bidang ilmu hubungan internasional, terutama di dalam rana teori realisme, yaitu konsep *balance of power*. Serupa dengan bagaimana konsep ini dipandang secara umum, *balance of power* dalam *defensive realism* juga menjelaskan bagaimana negara-negara bereaksi ketika satu negara menjadi terlalu dominan, dan oleh karena itu negara-negara yang lebih lemah akan memperkuat pertahanan dan kekuatan mereka sendiri untuk mencegah dominasi tersebut. Hal ini menciptakan efek penyeimbangan di mana ekspansi kemudian menjadi berisiko, karena lebih menciptakan oposisi daripada menjamin pencapaian kepentingan nasional (Rendall, 2006).

Memahami teori di balik *defensive realism* menunjukkan kepada kita respons Jepang yang waspada namun tegas terhadap *Island Chain Strategy* Tiongkok. Tidak seperti teori yang mengasumsikan bahwa negara mencari dominasi sebagai tujuan utama, *defensive realism* berpendapat bahwa negara-

negara seperti Jepang memprioritaskan *status quo* dan stabilitas. Militerisasi Tiongkok atas pulau-pulau dan jalur perairan di sekitarnya mengancam keamanan Jepang, yang mengakibatkan Jepang memperkuat industri pertahanan dan persekutuannya, sebuah langkah penyeimbangan klasik untuk menangkal ancaman tanpa memprovokasi konflik langsung. Melalui lensa *defensive realism*, respons Jepang tidak dianggap sebagai tanda kelemahan, namun sebagai respons strategis yang tepat untuk tidak menyebabkan agresi berlebihan dari Tiongkok.

Selain digunakan untuk menjelaskan respons Jepang sejauh ini, *defensive realism* juga dapat digunakan untuk memahami apa yang tidak dilakukan Jepang. Dimana walaupun dengan tingginya ketegangan antar kedua negara, Jepang tidak meninggalkan upaya diplomasi dengan Tiongkok atau mengisolasi Tiongkok dari rencana ekonomi Jepang. Sebagai contoh, ketidakpuasan kedua negara terhadap tarif Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump menyebabkan Tiongkok, Jepang, dan bahkan Korea Selatan untuk bekerja sama dan melakukan diskusi perdagangan pertama mereka dalam lima tahun terakhir (Reuters, 2025).

Upaya tersebut merupakan tanda yang jelas dari pengendalian rasional dalam menanggapi ancaman Tiongkok, menunjukkan bahwa tujuan Jepang bukanlah untuk berdiri di atas Tiongkok, melainkan mempertahankan *status quo* bukan hanya untuk stabilitas sendiri, tetapi juga stabilitas Indo-Pasifik secara keseluruhan, agar dapat bertahan hidup di kawasan di mana kekuatan Tiongkok terus berkembang. Dalam konteks *defensive realism*, respons dan tindakan Jepang merupakan contoh nyata dari sebuah negara yang memainkan pertahanannya

dengan cerdas di dalam sebuah permainan berbahaya, yang berfokus pada keamanan maritim mereka untuk melindungi jalur kehidupannya.

C. Konsep *Maritime Security*

Maritime Security atau keamanan maritime merupakan sebuah konsep yang mengacu pada perlindungan laut dan samudra dari ancaman yang dapat mengganggu perdagangan, navigasi, kedaulatan nasional, atau stabilitas regional, menjaga agar tetap aman dan stabil demi keuntungan semua pihak (McNicholas, 2016). Keamanan maritim sendiri merupakan sebuah konsep yang universal, dimana semua negara memiliki kewajiban berpatroli dan mengawasi perairan, dan bekerja sama untuk menangani ancaman lintas batas negara yang terjadi di perairan. Namun dalam konteks keamanan nasional, keamanan maritim mengacu pada kemampuan suatu negara untuk melindungi wilayah maritimnya sendiri dari ancaman eksternal, khususnya yang berasal dari negara lain. Berdasarkan konteks ini, keamanan maritim merupakan bagian integral dari keamanan nasional demi menjaga kedaulatan negara dan menangkal ancaman agar dapat memastikan akses tanpa gangguan untuk memenuhi kebutuhan maritim (Liss, 2022).

Mempertimbangkan pentingnya keamanan maritim bagi keamanan nasional, tidak dapat dipungkiri bahwa keamanan maritim menjadi landasan studi keamanan modern dan strategi militer, dikarenakan lautan pada akhirnya merupakan medan pertempuran geopolitik bagi kekuatan regional. (Bueger & Edmunds, 2017). Dari perspektif strategi militer, keamanan maritim membentuk cara negara memproyeksikan kekuatan dan mengelola eskalasi serta *deterrence*. Berbeda dari perang konvensional di darat, kontrol atas laut dan perairan

bergantung pada penghalangan akses dan kesadaran wilayah. Bagaimana sebuah negara mempertahankan perairan teritorialnya, mengendalikan lokasi maritim vital, dan mengamati pergerakan potensi ancaman di perairan mereka adalah bagian dari keamanan maritim (Brooks, 1986). Secara kritis, keamanan maritim adalah zona abu-abu antara peperangan dan perdamaian, yang sering mengakibatkan bentrok antar penjaga pantai dan konflik skala kecil lainnya.

Sama dengan dua teori sebelumnya, keamanan maritim modern sebagai sebuah konsep dikembangkan oleh berbagai ahli, dan tiga ahli tersebut yang secara spesifik berkaitan dengan topik penelitian, adalah Peter Dutton, Andrew S. Erickson, dan Toshi Yoshihara serta James Holmes. Karya mereka tentang keamanan maritim berfokus secara khusus pada aspek militer dari keamanan maritim, dan tidak terlalu menguraikan aspek-aspek non-militer. Dikarenakan pemikiran ketiganya digunakan untuk mengembangkan keamanan maritim sebagai konsep, penggunaan praktis dan kerangka kerja yang dihasilkannya menjadi lebih jelas dan membantu akademisi dan pembuat kebijakan dalam menavigasi seluk-beluk maritim modern.

Peter Dutton adalah salah satu pakar terkemuka di bidang studi maritim kontemporer, dengan fokus pada aspek hukum dan strategis dari sengketa maritim dalam karya-karya penelitiannya. Terutama, Dutton meneliti bagaimana hukum maritim, kekuatan angkatan laut, dan strategi geopolitik saling berkaitan dengan satu sama lain, terutama di wilayah bersengketa seperti Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Penelitiannya menyoroti pentingnya kerangka kerja hukum internasional dalam keamanan maritim, mempertimbangkan kondisi keamanan

maritim modern yang semakin dikendalikan oleh interpretasi hukum negara-negara tertentu (Dutton P. , 2012). Argumen utama Dutton adalah bahwa control atas wilayah maritim semakin diperebutkan melalui gabungan tindakan hukum, administratif, dan operational, yang disebut dengan "lawfare". Konsep "lawfare" ini menggunakan argumen hukum dan interpretasi kerangka kerja yang tersedia untuk menegaskan klaim atas zona maritim yang tersengketa (Dunlap Jr., 2001). Dengan ini, kerangka kerja hukum terkadang dimanipulasi untuk memberikan justifikasi atas klaim maritim, contohnya dalam kasus penggunaan kerangka kerja UNCLOS oleh Tiongkok untuk menciptakan klaim kepemilikan *de facto*-nya akan *Nine Dash Line*.

Karya ilmiah Dutton juga menyentuh pentingnya kebebasan navigasi sebagai pilar keamanan maritim, membahas bagaimana negara-negara tertentu berupaya memberlakukan pembatasan navigasi militer dan komersial dari negara lain dengan kedok keamanan nasional atau eksklusivitas ekonomi. Dalam pandangannya, kemampuan angkatan laut untuk beroperasi secara bebas di perairan internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas, menggarisbawahi perlunya penegakan hukum maritim yang konsisten untuk mencegah terjadinya pembatasan akses sepihak. Terakhir, Dutton menekankan peran *maritime domain awareness* atau MDA, dengan menyatakan bahwa MDA yang efektif merupakan langkah kunci dalam meningkatkan keamanan maritim (Dutton P. A., 2014).

Andrew S. Erickson adalah seorang Profesor di Naval War College Amerika Serikat, yang terkenal akan keahliannya dalam rana keamanan maritim Tiongkok, yang juga berisi prinsip-prinsip umum keamanan maritim di luar wilayah Asia.

Karyanya mengungkapkan bagaimana inovasi teknologi dan strategi asimetris membentuk kembali persaingan angkatan laut di seluruh dunia. Penekanan pada pengawasan berbasis ruang angkasa dan kemampuan siber dalam karyanya menyoroti sebuah fakta universal, bahwa pengendalian informasi sama pentingnya dengan pengendalian laut secara langsung dalam dunia maritim modern. Argumen ini dapat dibuktikan apabila melihat perkembangan drastis Angkatan Laut Tiongkok, yang mengembangkan teknologi sistem *Anti-Access/Area-Denial* (A2/AD), teknologi asimetris, dan MDA (Erickson, 2016).

Toshi Yoshihara dan James Holmes juga berkontribusi dalam pengembangan konsep keamanan maritim, secara spesifik dalam aspek persaingan negara-negara besar dan strategi angkatan laut. Seperti dengan Erickson, karya mereka berfokus pada ambisi maritim Tiongkok, pentingnya kekuatan angkatan laut, dan bagaimana keamanan maritim mempengaruhi dinamika geopolitik. Dalam karya mereka yang berjudul "*Red Star over the Pacific*", mereka berpendapat bahwa kekuatan laut tidak hanya tentang pengamanan rute perdagangan, tapi juga secara fundamental terkait dengan keamanan nasional dan persaingan strategis (Yoshihara & Holmes, *Red Star over the Pacific: China's Rise and the Challenge to U.S. Maritime Strategy*, 2013). Dengan argument ini, Yoshihara dan Holmes mengeksplorasi bagaimana Tiongkok telah mengadopsi prinsip-prinsip Mahan dalam ekspansi angkatan laut dan proyeksi kekuatan mereka, menciptakan persaingan strategis dan menekan negara-negara sekitarnya dalam upaya mereka untuk menegaskan dominasi angkatan laut di sekitar wilayah Indo-Pasifik.

Yoshihara dan Holmes juga lebih lanjut menekankan pentingnya *chokepoint* maritim dalam mengendalikan perairan regional dalam persaingan modern, yang dapat mempengaruhi keamanan ekonomi dan kepentingan militer. Dengan menggunakan *chokepoint* maritim tersebut, negara yang memegang kendali dapat memberikan tekanan pada negara-negara sekitarnya sebagai upaya *deterrence* maupun proyeksi kekuatan. Hal ini menantang prinsip kebebasan navigasi, dan memaksa negara-negara lain untuk menilai kembali keamanan maritim mereka sendiri, yang dapat dilihat dari respons Jepang terhadap ekspansi maritim Tiongkok. Yoshihara dan Holmes kemudian membahas bagaimana negara-negara dapat menanggapi ancaman keamanan maritim semacam itu melalui *deterrence* dan penyeimbangan angkatan laut (Yoshihara & Holmes, 2017). Dalam hal ini, penyeimbangan Angkatan laut tersebut menjadi sebuah bentuk *balance of power* untuk mencegah munculnya kekuatan maritim yang hegemonik.

Menggali dengan dalam pemikiran para ahli tersebut memberikan kita wawasan tentang pandangan dan kontribusi mereka kepada konsep keamanan maritim, serta relevansinya dengan bangkitnya Tiongkok serta respons Jepang terhadapnya. Apabila dilihat secara umum dari karya-karya mereka, terdapat lima prinsip inti dalam keamanan maritim: perlindungan kedaulatan, kebebasan navigasi, *maritime domain awareness*, keamanan kooperatif, dan *deterrence*.

Prinsip inti pertama, perlindungan kedaulatan, mengacu pada hak dan kemampuan suatu negara untuk mengontrol dan menjaga zona maritimnya, termasuk perairan teritorial dan ZEE yang dimiliki. Prinsip ini berakar kuat dalam hukum internasional, dan menjadi aspek utama dalam UNCLOS, yang berisi hak-

hak maritim negara berdaulat (Sedyantoputro, 2020). Dalam keamanan maritim, prinsip ini sangat penting dikarenakan betapa vitalnya wilayah maritim sebuah negara, tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga dalam nilai strategis dan simbolisnya (Nevers, 2015). Melindungi kedaulatan mereka melalui keamanan maritim tidak hanya memberikan nilai strategis bagi negara, namun juga melindungi hak-hak kedaulatan mereka atas zona maritim tersebut sekaligus dengan kedaulatan mereka secara keseluruhan. Perlindungan kedaulatan negara atas zona maritimnya menghasilkan prinsip inti keamanan maritim berikutnya—kebebasan navigasi.

Sebagai akibat langsung dari kemampuan negara untuk melindungi kedaulatan atas perairan mereka, kebebasan navigasi menjadi prinsip inti lain dalam keamanan maritim. Secara umum, kebebasan navigasi adalah prinsip bahwa kapal-kapal dari semua negara memiliki hak untuk bergerak bebas melalui perairan internasional dalam batasan hukum tertentu yang ditetapkan oleh hukum internasional, memastikan rute perdagangan global tetap terbuka dan tidak terhalang bagi semua (Rothwell & Stephens, 2023). Dalam konteks perairan nasional, hal ini merujuk pada pergerakan kapal asing yang diatur melalui laut teritorial suatu negara. Didefinisikan dalam UNCLOS Bagian II, Seksi 3, Artikel 17 – 35, laut teritorial suatu negara yang terbentang hingga 12 mil laut dari garis pantainya, harus memberikan hak “*innocent passage*” atau lintas damai kepada kapal-kapal asing selama transit mereka terus menerus, cepat, dan tidak mengancam keamanan nasional (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982). Namun, lintas damai itu sendiri tidak mutlak, dimana negara dapat mengatur

pelayaran kapal dengan mewajibkan adanya pemberitahuan atau otorisasi terlebih dahulu jika pelayaran tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Di sinilah perlindungan kedaulatan berperan, karena hak-hak kedaulatan suatu negara diuji melalui prinsip kebebasan bernavigasi, dan sebaliknya.

Akan tetapi, perlindungan kedaulatan dan kebebasan navigasi akan terganggu tanpa kemampuan negara dalam mengawasi wilayah perairannya melalui MDA, prinsip inti ketiga dalam keamanan maritim. MDA mengacu pada pemahaman efektif tentang apapun yang terkait dengan wilayah perairan yang dapat mempengaruhi keamanan, keselamatan, atau ekonomi. Prinsip ini adalah kemampuan suatu negara untuk secara efektif memantau perairan teritorial dan aktivitas di dalamnya, mendeteksi aktivitas terlarang, serta identifikasi kehadiran angkatan laut asing. Untuk mencapai prinsip ini, negara mengandalkan gabungan pengumpulan intelijen, sistem pengawasan maritim, teknologi radar, citra satelit, dan pertukaran informasi internasional. Oleh karena itu, perangkat teknologi terbaru dan canggih yang mampu mencapai hal-hal tersebut menjadi bagian penting dari keamanan maritim suatu negara (McDowell-Smith, 2023).

Prinsip inti keempat, keamanan kooperatif, tidak hanya ada sebagai prinsip dalam keamanan maritim, tetapi juga dalam pembahasan studi strategis secara keseluruhan. Namun dalam konteks keamanan maritim, hal ini mengacu pada bagaimana suatu negara bekerja sama dengan negara lain untuk mencapai keamanan maritim semaksimal mungkin. Upaya tersebut melibatkan pembangunan kemitraan dan persekutuan berbasis kepercayaan dengan negara-negara sekitar dan aktor maritim lainnya untuk meningkatkan MDA, memperkuat *deterrence* terhadap

ancaman yang meningkat, dan memastikan respons yang cepat terhadap ancaman yang ada. Upaya ini menciptakan sebuah jaringan tanggung jawab dan komitmen pertahanan bersama yang memperluas jangkauan dan ketahanan satu negara di perairan yang disengketakan (Barrionuevo, Guarda, & Victor, 2023). Esensi dari keamanan kooperatif dalam mempertahankan wilayah maritim jatuh pada upaya negara tersebut untuk melakukan penangkalan terhadap potensi ancaman, yang merupakan prinsip inti kelima dan terakhir dalam keamanan maritim.

Prinsip inti terakhir, *deterrence*, dapat dikatakan sebagai prinsip dan tujuan akhir dari keamanan maritim melalui lensa *defensive realism*, dimana melindungi stabilitas negara merupakan tujuan utama dari sebuah negara berdaulat. Dalam keamanan maritim, *deterrence* mengacu pada penggunaan kemampuan angkatan laut, persinyalan strategis, dan postur pertahanan untuk mencegah potensi musuh mengambil tindakan agresif atau koersif di perairan. Berdasarkan gagasan bahwa suatu negara dapat mencegah tindakan agresi dengan menunjukkan bahwa bayaran dari agresi akan lebih besar daripada potensi keuntungan apapun, ini merupakan tujuan inti dari ekspansi maritim negara-negara *defensive realist* (Rapp-Hooper, 2015). Tiga dari prinsip-prinsip tersebut—kebebasan navigasi, MDA, dan keamanan kooperatif, berkontribusi pada kemampuan penangkalan yang suatu negara dengan menunjukkan kehadiran angkatan laut yang terlihat dan mampu, sekutu yang dimiliki, dan kebebasan untuk bernavigasi. Ini merupakan maneuver strategis yang membantu menjaga perdamaian dengan memastikan bahwa segala jenis tindakan agresi akan dibalas dengan respons yang kuat dan tegas.

Dengan menelusuri keamanan maritim sebagai sebuah konsep, latar belakang, dan prinsip-prinsip intinya, kita dapat melihat betapa relevannya konsep ini ketika meneliti topik mengenai ketegangan maritim antar Tiongkok dan Jepang, terutama ketika melihatnya dari perspektif strategis Jepang. Sebagai negara maritim yang bergantung pada keberadaan jalur laut yang aman untuk kelangsungan hidup ekonomi dan impornya, Jepang menekankan pada keamanan maritim sebagai elemen inti dari kebijakan keamanan nasionalnya. Ekspansi maritim Tiongkok yang agresif di bawah *Island Chain Strategy* mereka telah mendorong Jepang untuk memperkuat postur maritimnya dan memperluas persekutuan strategisnya sebagai respons *defensive realist* terhadap Tiongkok. Oleh karena itu, menggunakan keamanan maritim sebagai konsep dalam menganalisis topik ini menawarkan lensa untuk memahami respons Jepang.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dalam memahami pengaruh *Island Chain Strategy* Tiongkok terhadap perubahan kebijakan pertahanan Jepang, khususnya dalam keamanan maritimnya. Penelitian-penelitian terdahulu ini menjadi dasar dalam menyoroti relevansi isu tersebut dalam studi strategis kontemporer, serta memberikan referensi dan argumen utama dalam meneliti topik tersebut. Di antaranya, berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan:

a) Artikel jurnal yang ditulis oleh Andrew S. Erickson dan Joel Wuthnow berjudul "*Barriers, Springboards, and Benchmarks: China Conceptualizes the*

Pacific 'Island Chains'” (Erickson & Wuthnow, 2016). Penelitian ini secara kritis mengkaji interpretasi Tiongkok terhadap konsep “*island chains*” di Pasifik, dengan menyatakan bahwa Tiongkok tidak hanya melihat rantai pulau tersebut sebagai sarana “kontra-intervensi”, namun memiliki pandangan yang lebih bernuansa. Berdasarkan publikasi People’s Liberation Army Tiongkok yang dipublikasikan, para penulis menemukan bahwa Tiongkok melihat rantai pulau tersebut sebagai penghalang, batu loncatan, dan tolok ukur. Artikel ini juga menyoroti variasi dalam definisi Tiongkok tentang rantai pulau, dan menekankan pada bagaimana *Island Chain* Pertama dianggap sebagai hambatan dan fokus strategis utama dalam strategi maritim Tiongkok.

Namun dari perspektif penelitian ini yang berfokus pada dampak *Island Chain Strategy* Tiongkok terhadap postur pertahanan dan keamanan Jepang, terlihat kesenjangan riset yang jelas: artikel ini sebagian besar mengabaikan lembaga, perspektif, dan tanggapan kebijakan Jepang. Meskipun Jepang merupakan komponen geografis dan strategis yang penting dari *island chain* Pertama dan Kedua, artikel ini tidak mengeksplorasi bagaimana pihak Jepang menafsirkan dan merespons strategi Tiongkok tersebut. Oleh karena itu, meskipun artikel ini secara efektif memperkaya pemahaman tentang perspektif dan doktrin militer Tiongkok, dan berfungsi sebagai referensi untuk memahami *Island Chain Strategy*, artikel ini tidak menjawab pertanyaan tentang reaksi dan respons Jepang.

b) Artikel jurnal yang ditulis oleh Christopher W. Hughes berjudul “*Japan’s ‘Resentful Realism’ and Balancing China’s Rise*” (Hughes, 2016). Artikel ini membahas strategi Jepang yang berkembang terhadap Tiongkok seiring dengan

kekuatan dan agresi Tiongkok yang semakin meningkat. Hughes merincikan bagaimana postur Jepang telah beralih dari *hedging* menjadi postur yang lebih asertif dalam menghadapi Tiongkok. Artikel ini mencatat bahwa peralihan ini dapat ditandai dengan penguatan persekutuan Jepang dan A.S., meningkatkan kemampuan militer sendiri, dan memperluas upaya diplomatik untuk menyudutkan Tiongkok. Argumen utama dalam artikel ini adalah bahwa kondisi-kondisi utama yang pernah mendukung pasifisme Jepang, seperti kepercayaan terhadap niat pasif Tiongkok, kemampuan pertahanan dari A.S., dan norma-norma pasifis dalam negeri, telah terkikis, yang akhirnya merubah postur pertahanan Jepang, terutama di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe sejak tahun 2012.

Meskipun artikel ini memberikan analisis yang komprehensif tentang postur keamanan Jepang yang menyesuaikan dengan agresi Tiongkok, penelitian ini lebih fokus kepada perdebatan strategis dan teoritis yang luas tanpa membahas secara eksplisit tentang penekanan Tiongkok terhadap pentingnya *Island Chain Strategy* mereka. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan riset yang terletak pada kurangnya fokus Hughes pada interpretasi Jepang terhadap *Island Chain Strategy* Tiongkok dan responnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan itu dengan mengeksplorasi bagaimana strategi itu secara langsung atau tidak langsung membentuk perubahan prioritas dan kebijakan pertahanan Jepang.

c) Artikel jurnal yang ditulis oleh Tomohito Shinoda berjudul “*Japan’s Response to Chinese Military Emergence in the Asia Pacific*” (Shinoda, 2016). Artikel ini menggali lebih dalam tentang bagaimana Jepang telah mengadaptasi kebijakan keamanannya sebagai tanggapan terhadap kekuatan dan asertivitas

Tiongkok yang semakin meningkat. Artikel ini menyoroti momen-momen penting seperti insiden Senkaku tahun 2010 dan 2012 yang memicu perubahan dalam opini publik Jepang, dan menelusuri evolusi Jepang dari fokusnya pada stabilitas *status quo*, menjadi strategi penyeimbangan yang tegas di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe. Secara khusus, artikel ini membahas efek dari Strategi Keamanan Nasional pertama pemerintahan Abe pada tahun 2013, implementasi undang-undang keamanan baru yang memungkinkan pertahanan diri kolektif, dan pembaruan pedoman pertahanan A.S.-Jepang. Artikel ini menyimpulkan bahwa transformasi kebijakan keamanan Jepang merupakan respons langsung terhadap ekspansi maritim Tiongkok yang agresif di Laut Cina Timur, dan mencerminkan perubahan postur pertahanan ke arah penangkalan proaktif dan penyeimbangan strategis yang lebih aktif di Kawasan Asia-Pasifik.

Dari ketiga artikel yang dijadikan penelitian terdahulu, penelitian Shinoda sejauh ini merupakan penelitian yang paling dekat dalam tujuan penelitian dan analisisnya dengan penelitian ini. Akan tetapi, meskipun artikel tersebut memberikan analisis yang komprehensif mengenai respons kebijakan Jepang terhadap kebangkitan militer Tiongkok, artikel tersebut tidak mengaitkan ekspansionisme agresif Tiongkok dengan *Island Chain Strategy*-nya. Dari perspektif penelitian ini yang meneliti korelasi serta sebab akibat langsung dari *Island Chain Strategy* terhadap kebangkitan ekspansionisme maritim Tiongkok serta respons Jepang terhadapnya, terdapat kesenjangan riset yang terletak pada tidak adanya diskusi tentang bagaimana pihak berwenang Jepang menafsirkan atau merespons kerangka kerja strategis tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini

bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut sekaligus membahas kasus-kasus yang lebih baru selama delapan tahun meningkatnya ketegangan antar kedua negara.